

KESIAPAN PEMBUKAAN KEMBALI SEKOLAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

SCHOOL REOPENING READINESS DURING COVID-19 PANDEMY: A PERSPECTIVE OF EDUCATION STAKEHOLDERS

Amaliah Fitriah

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lukman Solihin

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Joko Purnama

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ika Hijriani

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Imelda Widjaya

Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua apabila sekolah dibuka kembali dalam masa pandemi Covid-19. Pembukaan sekolah dalam masa pandemi Covid-19 telah menimbulkan pro dan kontra mengenai dampak yang dapat ditimbulkannya. Di satu sisi, penutupan sekolah dalam jangka waktu lama telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi siswa berupa kehilangan pencapaian belajar (*learning loss*), munculnya masalah kesehatan mental siswa, dan potensi hilangnya keuntungan ekonomi akibat penutupan sekolah. Di sisi lain, membuka kembali sekolah dalam masa pandemi Covid-19 juga dapat menimbulkan risiko yang tidak kalah serius, utamanya terkait dengan keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan tenaga kependidikan, maupun keluarganya. Survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan telah siap dalam berbagai aspek kesiapan pembukaan sekolah yang meliputi: prosedur pembelajaran tatap muka, pendataan kesehatan warga sekolah, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan. Namun survei juga menemukan walaupun sebagian besar sarana prasarana kesehatan sudah terpenuhi, masih banyak yang kondisinya belum memadai. Selain itu pendataan kesehatan juga belum dilakukan secara berkala dan maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus merencanakan kebijakan pembukaan kembali sekolah dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang harus dipersiapkan sebelum pembukaan kembali sekolah.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Pembukaan Sekolah, Belajar dari Rumah, Penutupan Sekolah, Pembelajaran Jarak Jauh.

ABSTRACT

This article aims to investigate the readiness of the school principals, teachers, local education offices, and parents if schools reopen during Covid-19 pandemic. The idea of school reopening during Covid-19 pandemic has raised concern over the risk of school reopening. On the hand,

the school closure for a long period has resulted in the learning loss among students, the problem in student's mental health status, and the potential of student's long term economic loss. On the other hand, the risk of school reopening during covid-19 also put a higher risk for students, teacher, and their families mainly in terms of their safety and health. This survey shows that the majority of teachers, principals, parents, and local education offices are ready and have made some preparations for school reopening regarding aspects of: the procedure for face to face learning, the mapping of school's members health status, the availability of health infrastructures and facilities, and the enforcement of health protocol. However, survey also indicates that regardless the availability of health infrastructures and facilities, many of them are inadequate. Also, the mapping of health status has not been conducted regularly. Therefore, the government needs to carefully plan the policy of school reopening considering the aspects need to be prepared before school reopening.

Keywords: Covid-19 Pandemic, School Reopening, Study from Home, School Closure, Long Distance Learning

A. Pendahuluan

Penutupan sekolah akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 68 juta anak Indonesia harus belajar dari rumah (BDR). Pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai upaya mengurangi dampak penutupan sekolah terhadap pembelajaran, namun akses yang tidak merata dan kondisi sosial ekonomi siswa yang beragam telah menyebabkan BDR tidak efektif. Mempertimbangkan hal ini, pemerintah menetapkan untuk membuka kembali sekolah sebagai upaya normalisasi proses pembelajaran. Pada 15 Juni 2020, menjelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021, pemerintah mengizinkan pembukaan kembali sekolah di zona hijau. Hal ini berarti hanya sekitar 6% anak Indonesia yang dapat memulai pembelajaran tatap muka (Arsendy, Senza, et al., 2020). Keputusan tersebut diperluas pada 7 Agustus 2020 dengan membolehkan pembelajaran tatap muka di zona kuning.

Apabila menelaah latar belakang munculnya kebijakan relaksasi pembukaan kembali sekolah tersebut, maka tampak bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru, orang tua, serta siswa dalam proses belajar dari rumah selama ini menjadi pertimbangan utama. Guru belum mampu mengelola pembelajaran dengan baik, orang tua kesulitan mendampingi anaknya belajar dari rumah, serta siswa

tidak optimal mengikuti pembelajaran karena tertekan, pembelajaran tidak menyenangkan, serta kesulitan berkonsentrasi dalam belajar (Kemendikbud, 2020c).

a. Kehilangan Kemampuan Belajar

Studi literatur mengenai dampak pandemi dan belajar dari rumah menunjukkan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi dalam dunia pendidikan. Sebagian besar negara di dunia telah melakukan penutupan sekolah dan berupaya menyediakan berbagai mode pembelajaran alternative pembelajaran jarak jauh. Namun, hanya setengah dari populasi siswa di dunia yang dapat mencapai ketuntasan kurikulum (survei OECD dikutip dalam *The Economist*, 18 Juli 2020).

Di Indonesia, Bank Dunia (World Bank) memperkirakan hasil capaian belajar dari rumah rata-rata hanya sebesar 33% apabila dibandingkan dengan capaian belajar normal di dalam kelas. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada menurunnya skor PISA siswa Indonesia, yakni dari skor 371 pada 2018 diperkirakan akan menurun menjadi 360, 355, dan 350 berturut-turut apabila sekolah ditutup selama 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan (World Bank, 2020).

Survei efektivitas belajar dari

rumah yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak, 2020) juga menemukan fakta bahwa BDR masih jauh dari efektif. Dari 96% siswa yang belajar dari rumah hanya kurang dari setengahnya yang belajar setiap hari, sebagian besar hanya belajar antara dua sampai empat hari per minggu. Dalam satu hari, rata-rata siswa hanya belajar kurang dari tiga jam. Sementara itu, rata-rata interaksi siswa dengan guru hanya dua setengah jam per hari (Puslitjak, 2020).

Tantangan lain dalam BDR adalah belum meratanya akses pada fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh, seperti internet dan listrik, terutama bagi para siswa di daerah tertinggal dan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hanya 40% penduduk Indonesia yang memiliki akses internet dengan variasi yang beragam antara Jakarta dan Papua (Arsendy, Senza. et.al, 2000). Dalam hal pembelajaran daring, secara nasional masih terdapat 44% siswa yang tidak menggunakan sumber belajar daring sama sekali, di daerah tertinggal persentasenya lebih besar, yakni mencapai 62% (Puslitjak, 2020). Ketiadaan pembelajaran tatap muka dan rendahnya efektivitas BDR ini telah membuat siswa kehilangan kemampuan belajar (*learning loss*). Kehilangan kemampuan belajar tersebut akan lebih besar pada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan orang tua berpendidikan rendah (INOVASI, 2020; SMERU, 2020). Hal ini berimplikasi pada kesenjangan capaian belajar siswa antar-wilayah dan antar-kelompok sosial yang berbeda. Siswa miskin yang sebagian besar tidak mempunyai akses internet dan memiliki orang tua yang tidak terdidik, cenderung menderita kerugian yang lebih besar lagi dibanding temannya dari kelompok berada (SMERU, 2020; INOVASI, 2020). Siswa miskin yang bersekolah di sekolah negeri di desa-desa, khususnya di luar Pulau Jawa rentan mengalami penurunan kemampuan belajar lebih besar dari siswa lainnya (SMERU,

2020). Selain itu, risiko putus sekolah juga meningkat, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan (SMERU, 2020). *Save the Children* memperkirakan penutupan sekolah berpotensi menyebabkan 10 juta siswa di seluruh dunia dapat mengalami putus sekolah, terutama anak perempuan (*The Economist*, 18 Juli 2020).

b. Dampak Ekonomi

Di samping berdampak langsung terhadap menurunnya capaian belajar siswa, pandemi juga memiliki efek jangka panjang pada menurunnya pendapatan ekonomi. Pendidikan merupakan harapan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pandemi Covid-19 telah menghilangkan kesempatan ini. Studi terbaru Bank Dunia (2020) mengungkapkan bahwa penutupan sekolah di Indonesia menyebabkan potensi hilangnya nilai pendapatan seumur hidup bagi seluruh siswa sekitar US\$ 151 miliar jika sekolah ditutup 4 bulan, yang setara dengan 13,5 persen dari PDB 2019. Apabila sekolah ditutup selama 8 bulan, maka potensi hilangnya pendapatan seluruh siswa diperkirakan mencapai US\$ 293 miliar atau setara dengan 26,2 persen dari PDB 2019. Secara internasional, penutupan sekolah selama lima bulan setara dengan memotong pendapatan hidup siswa yang terdampak sejumlah US\$10 triliun (*The Economist*, 18 Juli 2020).

c. Dampak Terhadap Kesehatan Mental

Aspek lain yang menjadi perhatian dan keprihatinan sebagai akibat penutupan sekolah pada masa pandemi Covid-19 ini adalah kesehatan mental dan sosioemosional anak, orang tua, dan guru. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat seperti tertera dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003). Lembaga Kesehatan Dunia mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata terbebas dari penyakit (WHO).

Artinya kesehatan mental merupakan bagian integral tak terpisahkan dari kesehatan itu sendiri.

Pandemi telah memicu berbagai tekanan mental sehingga dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan psikososial (WHO, 2020). Mulai dari meningkatnya rasa takut dan kecemasan akibat reaksi terhadap bahaya yang nyata, maupun karena kurangnya pengetahuan, merebaknya rumor, maupun misinformasi, meningkatnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap petugas medis, pasien, serta ketidakpercayaan terhadap informasi dari pemerintah dan otoritas.

Survei di Indonesia menemukan bahwa proporsi orang dengan gejala depresi pada masa pandemi Covid-19 mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi lima sampai enam kali dibandingkan kejadian depresi pada masyarakat umum berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 (Kompas, 28 Agustus 2020). Jumlah itu juga lebih besar dua sampai tiga kali dibandingkan dengan angka kejadian depresi pada kejadian bencana non-pandemi lainnya.

Dalam diskusi kelompok terpusat yang dilakukan Puslitjak bersama guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pakar terungkap kekhawatiran tentang dampak belajar dari rumah terhadap kesehatan mental siswa dan guru. Data dari Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia untuk penanganan COVID-19 yang terlibat dalam diskusi tersebut juga menunjukkan meningkatnya permasalahan psikologis di kalangan anak/remaja dan dewasa, dari yang ringan sampai berat, seperti stres umum, kekerasan, dan kecenderungan melukai diri sendiri (*self harm*). Tekanan mental ini, jika tidak ditangani, dapat meletup menjadi persoalan yang lebih besar.

Berbagai dampak penutupan sekolah akibat pandemi sebagaimana diuraikan di atas menjadikan opsi kebijakan pembukaan

kembali sekolah menjadi mendesak untuk dipertimbangkan, terutama di daerah yang relatif aman terhadap penularan Covid-19. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, yakni antara kelompok masyarakat yang ingin sekolah tetap ditutup dan kelompok masyarakat yang ingin sekolah dibuka kembali.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan para pemangku kepentingan dalam pembukaan kembali sekolah, antara lain dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa.

B. Rumusan Masalah

Artikel ini berangkat dari pertanyaan: aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah? Melalui pertanyaan tersebut, artikel ini berupaya untuk menginvestigasi kesiapan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Wacana pembukaan kembali sekolah mengemuka dan menjadi krusial untuk didiskusikan mengingat besarnya dampak penutupan kembali sekolah terhadap capaian hasil belajar siswa dan dampak signifikan lainnya, seperti telah diuraikan di atas. Setelah sekolah ditutup hampir delapan bulan (per Oktober 2020), pemerintah perlu untuk mulai mengantisipasi pembukaan kembali sekolah, sambil terus memperbaiki strategi keberlangsungan pembelajaran alternatif selama BDR. Namun merebaknya kembali berbagai kasus Covid-19 di berbagai negara setelah sekolah dibuka kembali (Suara.com, 2 September 2020; Tempo, 3 Oktober 2020), mendorong perlunya prinsip kehati-hatian dalam pembukaan sekolah. Untuk itu, studi kesiapan pembukaan kembali sekolah ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai masukan bagi pemangku kebijakan baik di pusat

maupun daerah, serta bagi satuan pendidikan guna memberikan gambaran aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembukaan kembali sekolah.

C. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dalam artikel ini diperoleh dari survei nasional mengenai kesiapan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam pembukaan kembali sekolah yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak Balitbang, Kemendikbud). Survei dilakukan pada Juni 2020 secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (SIM PKB).

Survei dibatasi hanya pada lingkup jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Responden survei terdiri dari 5.527 kepala sekolah, 77.746 guru, 11.054 orang tua, dan 158 kepala dinas atau sekretaris dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota, di mana jumlah mereka diperoleh berdasarkan partisipasi.

Pembahasan

UNESCO (2020) telah menekankan pentingnya mempertimbangkan strategi pembukaan kembali sekolah dalam masa pandemi Covid-19 yang meliputi 3 area, yaitu: 1. Kesiapan sistem, termasuk di dalamnya adalah melihat ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, sumberdaya lainnya, dan kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada; 2. Keberlanjutan pembelajaran, memastikan pembelajaran dapat berlangsung selancar mungkin seperti sebelum terjadinya disrupsi; dan 3. Ketahanan sistem (*system resilience*) membangun kesiapan sistem pendidikan dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak dari krisis. UNESCO menekankan

bahwa prioritas utama tetaplah menjamin kesehatan dan kesejahteraan warga sekolah (siswa, guru, dan tenaga kependidikan). Survei ini fokus pada area pertama dari kerangka UNESCO tersebut, yaitu kesiapan sistem.

Kebijakan pembukaan kembali sekolah perlu memperhatikan beberapa aspek agar penyelenggaraannya aman dan dapat memenuhi standar kesehatan. Hasil survei yang telah dilakukan kepada dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua (mewakili murid) menunjukkan, setidaknya terdapat enam aspek yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah, yaitu:

1. pertimbangan orang tua;
2. pemahaman prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka;
3. pendataan kondisi kesehatan warga sekolah;
4. ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan di sekolah;
5. penerapan protokol kesehatan; dan
6. pemberdayaan dukungan berbagai pihak.

a. *Pertimbangan Orang Tua*

Sebelum sekolah dibuka kembali, penting untuk mengetahui alasan atau pertimbangan yang mendorong orang tua dapat mengizinkan anak untuk kembali bersekolah, karena izin orang tua merupakan salah satu syarat dalam keputusan bersama empat kementerian (Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri) dalam kebijakan pembukaan kembali sekolah.

Dalam keputusan bersama yang diumumkan oleh Menteri Nadiem Makarim pada 15 Juni 2020 disebutkan, syarat pembukaan kembali sekolah antara lain terdiri dari: (a) status zona daerah kabupaten/kota; (b) kebijakan pembukaan kembali sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah; (c) satuan pendidikan atau sekolah telah memenuhi daftar pemeriksaan dan siap

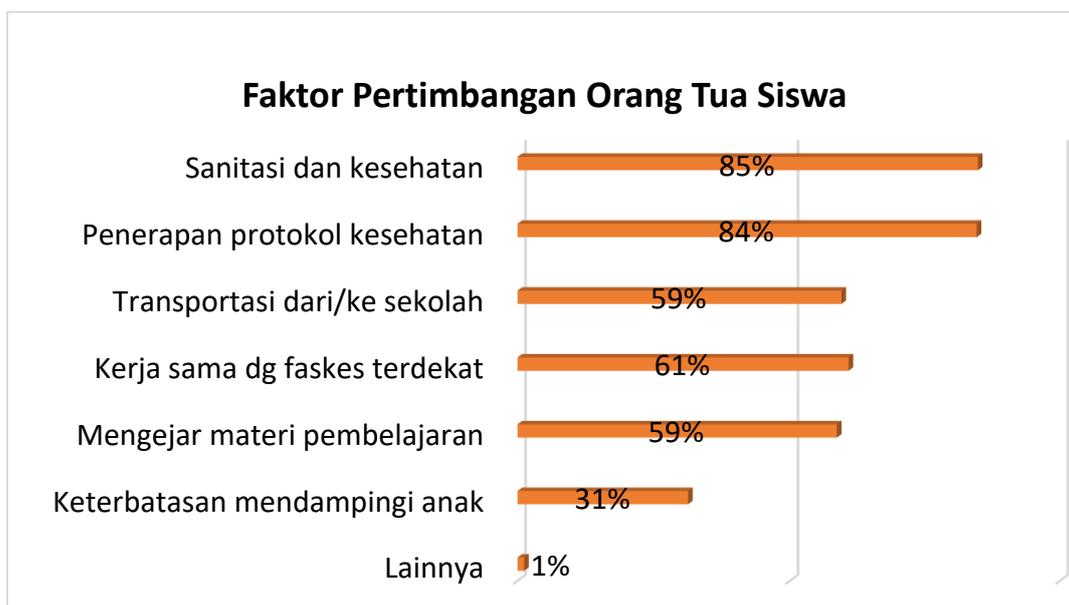
melakukan pembelajaran tatap muka; dan (d) persetujuan orang tua. Daftar periksa yang dimaksud pada poin c antara lain terdiri dari ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan terdekat, prosedur penerapan protokol kesehatan di sekolah, serta kesepakatan dengan komite sekolah (Kemendikbud, 2020).

Dalam keterangan publik yang disampaikan oleh Nadiem Makarim pada 15 Juni 2020 juga disebutkan, apabila di daerah yang telah mengambil kebijakan untuk pembukaan kembali sekolah masih terdapat orang tua yang merasa tidak berkenan untuk mengizinkan anaknya, maka orang tua dapat meminta izin kepada sekolah agar anaknya tetap dapat melangsungkan proses belajar dari rumah (Kemendikbud, 2020).

Melihat mekanisme penerapan kebijakan pembukaan kembali sekolah di atas, maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan ialah aspirasi orang tua. Survei terhadap orang tua yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap keamanan dan keselamatan anak menjadi prioritas dibandingkan persoalan ketercapaian hasil belajar.

Jamak diketahui bahwa proses belajar dari rumah menimbulkan banyak kendala dan belum optimal sehingga capaian belajar siswa tidak maksimal. Namun, meskipun dampak penutupan sekolah terhadap capaian belajar anak sangat signifikan, orang tua lebih mempertimbangkan faktor kesehatan dan keamanan dibanding kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan belajar anak.

Tabel 1. Pertimbangan Orang Tua dalam Mengizinkan Anak Kembali ke Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020.

Tabel di atas yang menggambarkan faktor pertimbangan orang tua siswa memperlihatkan bahwa pertimbangan utama orang tua adalah kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana kebersihan dan kesehatan, seperti seperti fasilitas cuci

tangan atau *hand sanitiser*, sanitasi, dan desinfektan (85%); penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, pembatasan jumlah siswa di kelas, dan pembatasan kerumunan (86%); kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat (61%);

dan keamanan transportasi anak menuju dan dari sekolah (59%).

Menariknya, dari grafik di atas, hanya sekitar 59% orang tua yang menaruh perhatian pada faktor ketertinggalan pembelajaran anak sebagai alasan untuk mengizinkan anak kembali sekolah, serta 31% memiliki alasan tidak memiliki waktu dan kemampuan mendampingi belajar dari rumah. Hasil ini menunjukkan bahwa orang tua lebih memprioritaskan aspek kesehatan dan keamanan dibanding kebutuhan mencapai ketertinggalan belajar anak.

b. Pemahaman Prosedur Pelaksanaan Belajar Tatap Muka

Dinas Pendidikan dan kepala sekolah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan dan keamanan sebelum sekolah dibuka kembali. Sampai saat ini, kecenderungan transmisi Covid-19 masih tinggi dan belum ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir.

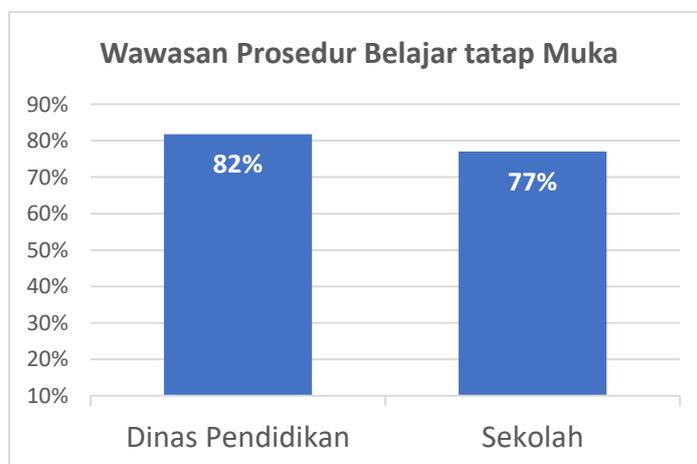
Proses pembukaan kembali sekolah harus memastikan prosedur belajar tatap muka yang aman dan ketat. Untuk itu, Kemendikbud telah menerbitkan buku *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease* (Kemendikbud, 2020a) sebagai panduan

dalam melakukan pembukaan kembali sekolah.

Guna mengetahui apakah informasi mengenai prosedur pembukaan kembali sekolah sebagaimana dalam buku panduan tersebut telah dipahami dengan baik oleh para pengambil kebijakan di daerah, maka survei yang kami lakukan juga menanyakan wawasan terkait prosedur ini kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar dinas pendidikan dan kepala sekolah telah memahami prosedur pembelajaran tatap muka dengan baik (dinas pendidikan 82% dan kepala sekolah 77%).

Prosedur yang dimaksud meliputi syarat pembukaan kembali sekolah menurut ketentuan dalam buku panduan, antara lain: (a) status zona yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka; (b) kebijakan dari pemerintah daerah untuk melakukan pembukaan kembali sekolah; (c) sekolah telah memenuhi daftar periksa yang meliputi sarana kebersihan dan kesehatan, kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, dan upaya penerapan protokol kesehatan di sekolah; (d) persetujuan orang tua melalui komite sekolah; dan (e) bagi orang tua yang tidak setuju anaknya mengikuti belajar tatap muka, diperbolehkan anaknya untuk tetap melakukan belajar dari rumah.

Tabel 2. Wawasan terhadap Prosedur Pembelajaran Tatap Muka



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020.

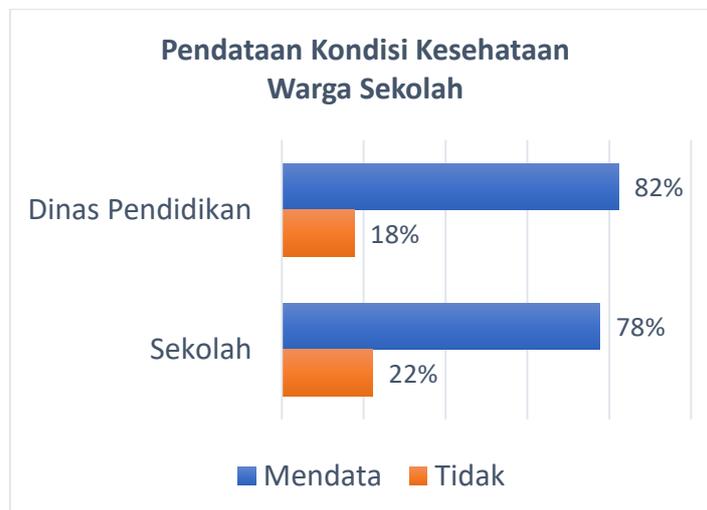
c. Pendataan Kondisi Kesehatan Warga Sekolah

Pendataan kondisi kesehatan warga sekolah merupakan syarat penting lainnya dalam kebijakan pembukaan kembali sekolah, yakni menjadi bagian dalam daftar periksa yang harus dipenuhi oleh sekolah (Kemendikbud, 2020a). Selain itu, dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Sekjen Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 juga menyebutkan, pendataan kondisi warga sekolah merupakan tanggung jawab dari dinas

pendidikan dan sekolah selama masa pandemi. Pendataan yang dimaksud meliputi kondisi kesehatan serta kondisi kendala pembelajaran yang dialami oleh siswa selama proses belajar dari rumah.

Melihat pentingnya aspek pendataan kondisi kesehatan selama masa pandemi maupun untuk persiapan pembukaan kembali sekolah, maka survei ini juga menanyakan kebijakan pendataan yang dilakukan oleh dinas pendidikan maupun sekolah. Hasilnya, sebagian besar dinas pendidikan (82%) dan sekolah (78%) telah melakukan pendataan.

Tabel 3. Pendataan Kondisi Kesehatan Warga Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Namun demikian, dalam diskusi pendalaman dengan dinas pendidikan dan kepala sekolah terungkap bahwa pendataan tersebut belum dilakukan secara berkala. Pendataan baru dilakukan satu kali pada awal penerapan belajar dari rumah. Artinya, dari keterangan tersebut tampak bahwa pendataan belum diperbaharui sehingga belum bisa memotret dinamika atau perkembangan kondisi kesehatan warga sekolah. Padahal, mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang sangat dinamis, pembaharuan data sangat penting dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan

kesehatan warga sekolah sebelum sekolah dibuka kembali.

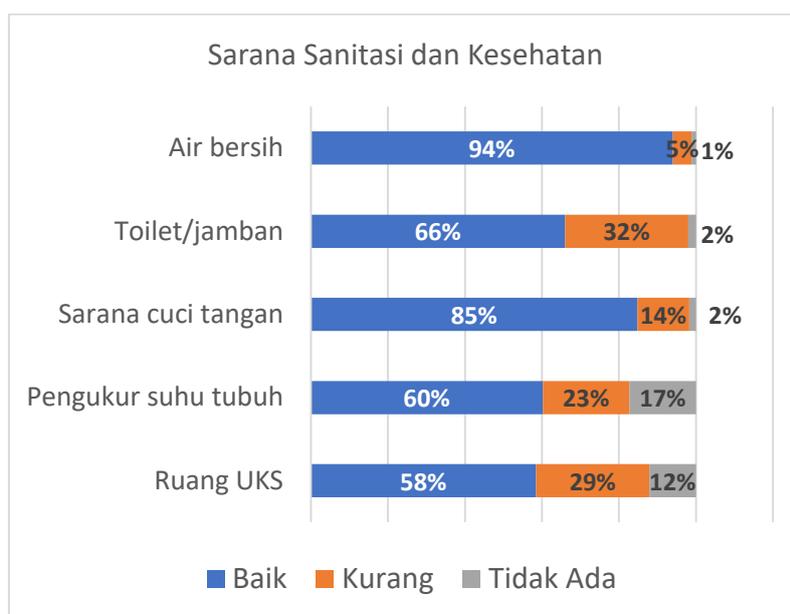
d. Ketersediaan Sarana Sanitasi dan Kesehatan di Sekolah

Penerapan protokol kesehatan di sekolah dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana kebersihan (sanitasi) dan kesehatan yang memadai. Fasilitas sanitasi dan kesehatan tersebut meliputi ketersediaan air bersih, toilet, tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, serta ruang unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan ini sebetulnya juga menjadi salah satu item yang perlu dipenuhi dalam daftar periksa yang menjadi syarat pembukaan kembali sekolah (*Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19*). Keberadaan sarana tersebut penting tidak hanya karena menjadi syarat pembukaan kembali sekolah, melainkan karena upaya untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti melakukan cuci tangan pakai sabun, pengecekan suhu tubuh, dan penanganan sementara bagi siswa yang sakit di sekolah hanya dapat terpenuhi apabila berbagai sarana tersebut tersedia.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah (94%) telah memiliki sumber air bersih, 85% sekolah telah memiliki sarana cuci tangan, namun sarana toilet baru terpenuhi sekitar 66% dalam kondisi baik—selebihnya masih kurang bahkan tidak memiliki. Begitu pula, hanya sekitar 60% sekolah yang telah memiliki alat pengukur suhu tubuh, dan 58% yang memiliki ruang UKS. Data ini menunjukkan bahwa sarana kebersihan dan kesehatan di sekolah masih belum optimal sebagai syarat yang perlu dipenuhi untuk pembukaan kembali sekolah.

Tabel 4. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Sanitasi dan Kesehatan di Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Data survei di atas ternyata memiliki kemiripan dengan data kondisi sarana prasarana, khususnya mengenai fasilitas sanitasi di sekolah, sebagaimana ditampilkan dalam buku *Statistik Pendidikan 2019/2020* untuk jenjang SD, SMP, dan SMA (Kemendikbud, 2020b). Di tingkat SD misalnya, sebanyak 83,25% sekolah memiliki kecukupan air, 73,36% memiliki toilet siswa, dan 50,92% memiliki toilet siswa terpisah. Di tingkat SMP,

sebanyak 83,76% sekolah memiliki kecukupan air, 79,20% memiliki toilet siswa, dan 64,47% memiliki toilet siswa terpisah. Sedangkan di tingkat SMA, 88,21% sekolah memiliki kecukupan air, 89,33% memiliki toilet siswa, dan 72,65% memiliki toilet siswa terpisah.

Keterbatasan fasilitas sanitasi di sekolah juga dilaporkan dalam *Data Service Delivery Indicator (SDI) 2019* sebagaimana dikutip dalam laporan Bank

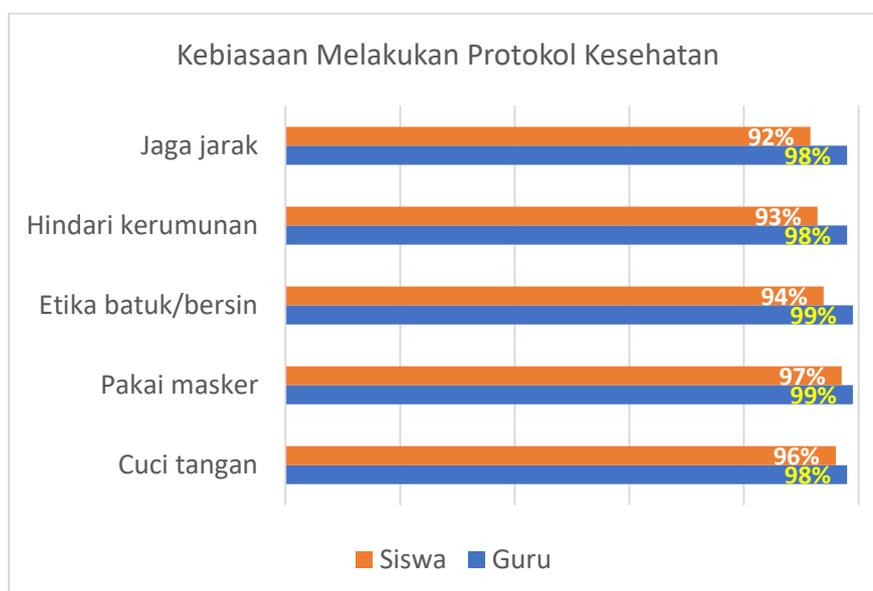
Dunia (Agustus 2020) bahwa hanya 50% madrasah di bawah Kemenag dan 56% sekolah di bawah Kemdikbud yang disurvei yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun. Data itu juga menunjukkan kesenjangan antara sekolah/madrasah di perkotaan dan perdesaan, di mana di perkotaan cenderung lebih baik kondisinya.

Temuan survei dan data dari berbagai pihak mengenai sarana sanitasi dan kesehatan di sekolah yang belum sepenuhnya memadai perlu mendapat perhatian. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan sarana kebersihan dan kesehatan sebelum pembukaan kembali sekolah dilakukan.

e. Penerapan Protokol Kesehatan

Aspek berikutnya yang tak kalah penting ialah penerapan protokol kesehatan yang ketat di sekolah. Untuk itu, perlu dipastikan kesiapan warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan sebelum sekolah dibuka kembali. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan siswa telah terbiasa menerapkan protokol kesehatan, seperti melakukan cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menerapkan etika ketika batuk/bersin, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik.

Tabel 5. Kebiasaan Warga Sekolah dalam Menerapkan Protokol Kesehatan



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Gencarnya kampanye protokol kesehatan Covid-19 dengan slogan 3M (mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak) telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Perubahan perilaku ini tentu menjadi modal penting dalam pembukaan kembali sekolah.

Namun demikian, apabila sekolah akan dibuka kembali, yang menjadi kekhawatiran guru dan kepala sekolah

adalah penerapan protokol kesehatan di luar sekolah. Dalam diskusi yang kami lakukan dengan guru dan kepala sekolah terungkap, mereka umumnya dapat menjamin penerapan protokol kesehatan di dalam lingkungan sekolah karena lingkungannya yang relatif terbatas. Akan tetapi, kondisi penerapan protokol kesehatan di luar sekolah tidak dapat mereka jangkau sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Perilaku di luar sekolah yang belum menunjukkan tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif apabila sekolah dibuka kembali. Oleh karena itu, para guru dan kepala sekolah berharap agar sebelum sekolah dibuka, pemda perlu memastikan penerapan protokol kesehatan tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah.

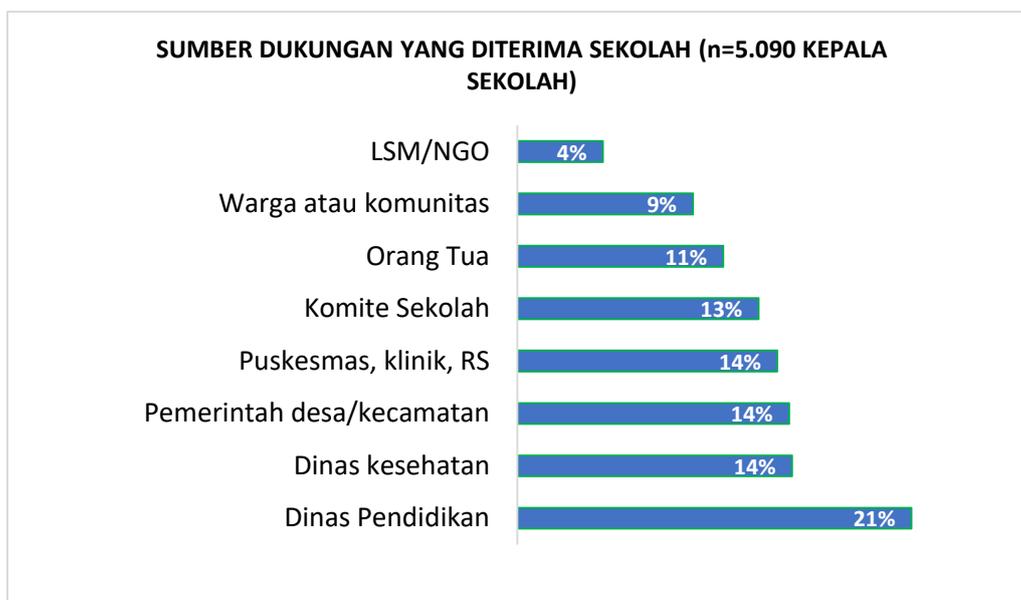
f. Dukungan Berbagai Pihak

Aspek yang tidak kalah penting dalam melihat kesiapan pembukaan kembali sekolah adalah dukungan berbagai pihak kepada sekolah. Survei ini juga

melihat pihak mana saja yang memberikan dukungan terhadap sekolah selama pandemi Covid-19 dan apa saja bentuk dukungan yang telah diberikan.

Dukungan bagi sekolah ini penting karena sekolah tidak dapat mengusahakan sendiri upaya pencegahan maupun penerapan protokol kesehatan di sekolah. Dilihat dari pihak mana saja yang secara aktif memberikan bantuan kepada sekolah, maka dinas pendidikan merupakan lembaga yang memberikan dukungan terbanyak (21%), kemudian disusul oleh dinas kesehatan, pemerintah desa atau kecamatan, komite sekolah, dan warga atau komunitas.

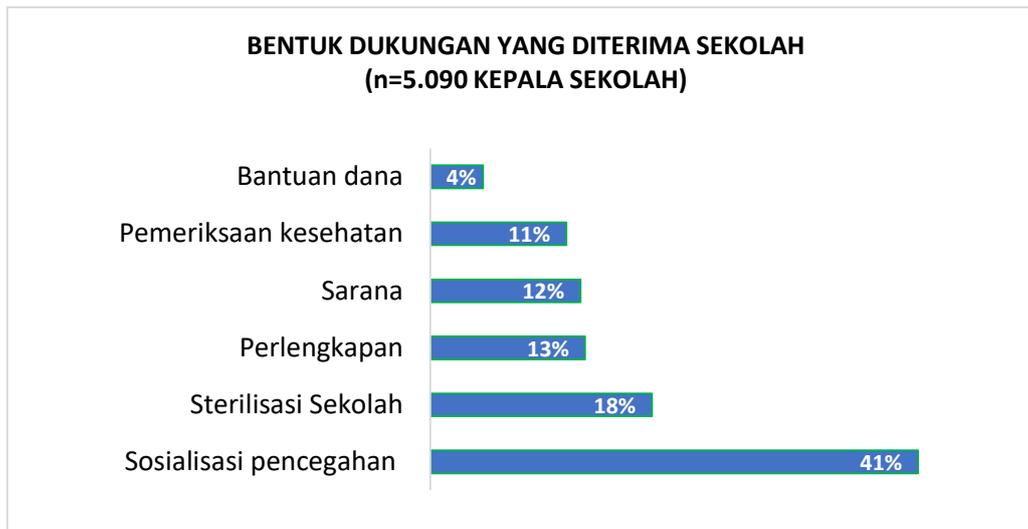
Tabel 6. Sumber Dukungan yang Diterima Sekolah



Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Dukungan berbagai pihak kepada sekolah tentu patut diapresiasi. Namun demikian, apabila didalami lebih jauh, bentuk dukungan yang diberikan kepada sekolah sejauh ini baru sebatas pada sosialisasi (21%). Dukungan riil untuk pencegahan seperti sterilisasi sekolah baru

sebesar 18%, disusul dengan dukungan perlengkapan (13%), dukungan untuk melengkapi sarana kebersihan (12%), pemeriksaan kesehatan (11%), dan bantuan berupa dana (4%).

Tabel 7. Bentuk Dukungan yang Diterima Sekolah

Sumber: Survei Kesiapan Pembukaan Kembali Sekolah, Puslitjak, 2020

Apabila melihat kondisi sekolah yang belum sepenuhnya memiliki sarana sanitasi dan kesehatan yang memadai, maka bentuk dukungan yang ada perlu diarahkan untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, seperti telah dibahas pada bagian tentang penerapan protokol kesehatan, para guru dan kepala sekolah dalam diskusi yang kami lakukan juga mengungkapkan pentingnya peran masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah dalam menerapkan disiplin di luar sekolah. Apabila pembukaan kembali sekolah dianggap sebagai tanggung jawab bersama, maka pihak sekolah merasa optimis pembukaan kembali sekolah dapat diterapkan dengan aman.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Mengingat risiko pandemi Covid-19 terhadap pembukaan kembali sekolah, pemerintah harus memperhitungkan berbagai faktor dalam strategi pembukaan kembali sekolah dengan menempatkan kesehatan dan keselamatan warga sekolah pada prioritas utama.

Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah kesiapan sistem, baik kesiapan sumber daya manusia dan

sumberdaya lainnya, sarana prasarana, dan pemahaman para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Survei ini memotret bagaimana kondisi kesiapan para pemangku kepentingan dalam pembukaan kembali sekolah untuk memberi gambaran aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum pembukaan kembali sekolah.

Survei ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator kesiapan berupa pengetahuan akan prosedur pembelajaran tatap muka dan protokol kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan dan kebersihan, pendataan warga sekolah, dan dukungan berbagai pihak, maka secara umum kesiapan dalam pembukaan kembali sekolah sudah relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Dukungan orang tua adalah suatu keharusan dalam pembukaan kembali sekolah. Untuk itu, sekolah harus memastikan dukungan orang tua dalam persiapan maupun pelaksanaan belajar tatap muka, baik melalui Komite Sekolah maupun perseorangan. Dukungan tidak semata terkait dengan “izin orang tua”, tetapi terutama peran orang tua dalam menjamin siswa agar aman selama menuju dan pulang dari

- sekolah, membekali siswa dengan masker, makan dan minum, serta mendukung sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan dan memenuhi sarana dan prasarana kebersihan yang diperlukan.
2. Dinas Pendidikan perlu secara aktif terus mensosialisasikan prosedur pembelajaran tatap muka yang aman, dan sekolah harus memastikan prosedur tersebut terpenuhi sebelum memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Panduan pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dapat dipelajari dengan seksama dan menjadi acuan dalam menerapkan pembelajaran tatap muka yang aman.
 3. Sebelum sekolah dibuka kembali, dinas pendidikan dan sekolah perlu melakukan pendataan kondisi kesehatan dan keamanan warga sekolah secara menyeluruh dan berkala, dan senantiasa memperbarui data tersebut. Setelah sekolah dibuka, dinas pendidikan perlu melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka yang sedang berjalan berdasarkan data yang telah diperbaharui, dan mengambil kebijakan yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
 4. Sebelum sekolah dibuka kembali, sekolah harus menjamin ketersediaan sarana kebersihan dan kesehatan yang memadai, meliputi kecukupan air, toilet, sarana cuci tangan pakai sabun, alat pengukur suhu tubuh tembak, dan ruang UKS. Jumlah dan kondisi minimum kelengkapan sarana dan prasarana tersebut telah diatur dalam Permendiknas 24/2007. Perbaikan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat menggunakan dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.
 5. Ketika pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali, sekolah harus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dinas pendidikan setempat perlu melakukan evaluasi berkala dibantu oleh pengawas sekolah yang secara rutin memantau kondisi sekolah. Dinas Pendidikan juga perlu membuka kotak pengaduan guna menerima masukan dari orang tua dan masyarakat.
 6. Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dalam memastikan kelancaran dan keamanan jalannya pembelajaran tatap muka merupakan modal utama dalam keberhasilan pembukaan kembali sekolah. Dalam konteks Indonesia, modal sosial ini telah terbukti dapat menjaga ketahanan sosial-ekonomi. Dalam kondisi pandemi, modal sosial ini perlu dikuatkan kembali dan diarahkan untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan untuk pembukaan kembali sekolah, seperti kebutuhan akan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan, kebutuhan pemenuhan gizi anak, kebutuhan tenaga kesehatan, dan bentuk dukungan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Kemendikbud, 2020a, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19, Jakarta: Kemendikbud, 2020
- Kemendikbud, 2020b, Statistik Pendidikan 2019/2020 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Jakarta: Kemendikbud, 2020

Jurnal

- Arsendy, Senza.; Gunawan, C. Jazzlyne.; Rarasati, Niken.; and Suryadarma, Daniel., 2020, *Teaching and Learning During School Closure: Lessons from Indonesia*, ISEAS Perspective, Issue: 2020, No. 89

Dokumen

Puslitjak, 2020, *Mengatasi Risiko Belajar Dari Rumah*, Risalah Kebijakan, https://puslitjak.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-dari-rumah

SMERU, 2020, *Belajar dari Rumah: Potret Ketimpangan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19*, SMERU Research Institute, <http://smeru.or.id/id/content/belajar-dari-rumah-potret-ketimpangan-pembelajaran-pada-masa-pandemi-covid-19>

UNESCO, *School reopening, UNESCO COVID-19 Education Response: Education Sector Issue Note 7.1*, April 2020

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

WHO, *Catatan tentang Aspek Kesehatan Jiwa dan Psikososial Wabah Covid-19*, Februari 2020, https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/catatan-tentang-aspek-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-wabah-covid-19-feb-2020-indonesian.pdf?sfvrsn=e8ae5645_2

World Bank, 2020, Report, *Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/211871597656902862/pdf/Estimates-of-COVID-19-Impacts-on-Learning-and-Earning-in-Indonesia-How-to-Turn-the-Tide.pdf>

Website

Kemendikbud, 2020c, "Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19", 7 Agustus 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/>

<blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>

Kompas, "Pemerintah Diminta Perhatikan Kesehatan Mental Masyarakat Saat Pandemi Covid-19" <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/11320291/pemerintah-diminta-perhatikan-kesehatan-mental-masyarakat-saat-pandemi-covid>, diakses 17 September 2020

INOVASI, 2020, *Riset dampak COVID-19: potret gap akses online 'Belajar dari Rumah' dari 4 provinsi*, <https://theconversation.com/riset-dampak-covid-19-potret-gap-akses-online-belajar-dari-rumah-dari-4-provinsi-136534>

Suara.com, "Tahun Jaran Baru, Hongaria Cata Rekor Kasus Covid-19 Harian Tertinggi", <https://www.suara.com/health/2020/09/02/194750/tahun-ajaran-baru-hongaria-catat-rekor-kasus-covid-19-harian-tertinggi>, diakses 2 September 2020

Tempo, "Kasus Covid-19 Meningkat di Sekolah, AS Perluas Tes Covid-19 pada Siswa", <https://tekno.tempo.co/read/1392722/kasus-covid-19-meningkat-di-sekolah-as-perluas-tes-covid-19-pada-siswa/full&view=ok>, diakses 3 Oktober 2020

The Economist, "The Risk of Keeping Schools Closed Far Outweigh the Benefits", <https://www.economist.com/leaders/2020/07/18/the-risks-of-keeping-schools-closed-far-outweigh-the-benefits>, diakses 18 Juli 2020

WHO, *Health Definition*, <https://www.who.int/about/who-we-are/constitution>